

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan liberalisasi perdagangan dan sistem mekanisme pasar secara vulgar, termasuk di sektor pangan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga yang mengatur tata niaga, saat ini justru tidak berpihak pada rakyat. Misi Bulog secara tersirat dan tersurat tertuang dalam UUD 1945, salah satu petikannya adalah *'seluruh hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-sebesarannya untuk kesejahteraan rakyat'*. Juga disebutkan bahwa *'sumber-sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan rakyat'*.

Berdasarkan isi dari UUD 1945 tersebut, memang dituntut dibentuknya lembaga semacam Bulog yang mengelola kekayaan negara. Namun, pada tahun 1997 pada era krisis moneter Bulog berubah statusnya menjadi PT (perum) atas desakan IMF dan WTO. Sejak perubahan status baru Bulog inilah, Negara dibatasi dalam campur tangan urusan tata niaga. Bulog sebagai satu-satunya lembaga yang mengelola kekayaan bangsa Indonesia, harus tunduk pada swasta.

Sebagai Negara penganut sistem ekonomi terbuka (open economic), situasi pasar domestik Indonesia akan selalu terpengaruh dengan kondisi pasar

Internasional yang semakin liberal. Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai kesepakatan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang menginginkan penurunan hambatan tariff dan non-tarif, karena hal ini Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam proses liberalisasi pasar dalam negeri. Tekanan liberalisasi tersebut melalui berbagai aturan kesepakatan kerjasama, bukan tidak mungkin dapat berbenturan dengan kebijakan internal dan mengancam kepentingan nasional.

Menjamurnya liberalisasi pangan dan pertanian dalam kesatuan Negara NKRI ini, mengakibatkan anjloknya harga pangan nasional. Swasembada pangan dalam perspektif 'ketahanan pangan nasional', pada praktiknya hanya meningkatkan kecenderungan harga pangan dari pasar impor. Hal ini lebih tepatnya membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk, karena bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengambil judul penelitian dengan tajuk **“Pengaruh Letter of Intent IMF Terhadap Kebijakan Pangan (Beras) Indonesia (*The Impact of IMF LOI to Indonesian Food (Rice) Policy*)”**.

B.Latar Belakang Masalah

Masalah pangan bukan semata masalah pertanian, tapi juga masalah politik. Pangan terkait erat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tepat sebelas tahun lalu pada tahun 1998, perdebatan dan wacana masalah keterkaitan antara pangan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memasuki salah satu masa puncaknya. Hal ini, salah satunya,

dipicu oleh pemberian hadiah Nobel Ekonomi kepada Profesor Amartya Kumar Sen, seorang guru besar Universitas Oxford. Sen, secara gamblang, memperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mengakibatkan bencana kelaparan yang sangat menyedihkan (*famine*), bahkan ketika produksi dan persediaan pangan melimpah pada saat itu.¹

Secara geografis Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, terdiri dari pulau-pulau besar yakni Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa dan Papua. Populasi penduduk Indonesia mencapai 222 juta jiwa pada tahun 2006, dan sebagian besar tinggal di pulau Jawa. Sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari hasil pertanian, namun mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil². Pemilikan tanah rata-rata di Jawa kurang dari 0,5 ha. Sangat berbeda halnya dengan pemilikan tanah petani di Bangladesh, India timur dan delta Mekong River (Vietnam) yang rata-rata memiliki luas lahan 1 ha. Dan sebagian besar Negara di Asia mencapai 1-2 ha, Thailand, Kamboja dan Myanmar mencapai lebih dari 2 ha untuk masing-masing penduduk. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan Amerika yang juga merupakan Negara eksportir beras dengan rata-rata luas lahan tiap penduduk mencapai 200 ha.³

¹ Amartya Kumar Sen dalam Roem Topatimasang, "Melawan Mitos", *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, Edisi 23, 2008, h. 3.

² www.wikiindonesia.com/geografi_indonesia diakses pada 7 Januari 2009 BBWI.

³ Erani Yustika Ahmad, "Menjinakkan Liberliisme", Pustaka Belajar, November, 2005. hal:26

Membicarakan ketahanan pangan di Indonesia berarti juga membicarakan ketersediaan beras yang bisa diakses secara fisik dan ekonomi oleh masyarakat.⁴ Revolusi Hijau yang gencar diterapkan pemerintah Orde Baru antara tahun 1970-an s.d 1990-an hanya terfokus pada peningkatan produksi beras melalui penggunaan benih padi unggul, pupuk kimia dan racun hama. Revolusi Hijau dengan konsep monokultur, yaitu intensifikasi satu jenis tanaman (padi) membuat sistem pangan bukan beras di Indonesia semakin berkurang. Hal ini diperparah dengan program Raskin (beras untuk rakyat miskin) yang mulai digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2000. Sekilas, program ini memang bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas warga miskin terhadap beras. Namun disisi lain, program Raskin memaksa masyarakat di daerah yang semula memiliki sistem pangan bukan beras untuk mengkonsumsi beras. Raskin menggusur tradisi pangan ubi-ubian masyarakat pedalaman propinsi Papua yang sudah berlangsung ratusan tahun.⁵ Padahal pengetahuan masyarakat Papua tentang ubi-ubian tergolong tinggi, sementara pengetahuan tentang pertanian padi hanya berkembang dikalangan masyarakat transmigran. Hal ini membuat ketahanan pangan masyarakat Papua menjadi rentan.⁶ Hal yang sama juga terjadi di NTT, dimana penduduk terbiasa mengkonsumsi jagung sebagai bahan pangan utama.

⁴ Jhamtani Hira, *Lambung Pangan, Menata Ulang Kebijakan Pangan*, Insist Press, Yogyakarta, 2008, h. 37.

⁵ *Kompas*, 13 Agustus 2008

⁶ *Kompas*, 24 November 2008

Maka tidak heran jika beras menjadi komoditas yang memainkan posisi strategis di negeri ini. Saat ini 96 % perut penduduk Indonesia, bergantung pada beras.⁷ Pangsa beras pada konsumsi energi per kapita mencapai 54,3 persen. Artinya, lebih dari setengah *intake* energi penduduk Indonesia bersumber dari beras. Sekitar 40 persen sumber protein dipenuhi dari beras. Siapapun yang mengkonsumsi beras dengan jumlah yang cukup, tidak akan kekurangan protein. Diperkirakan 30% pengeluaran warga miskin diperuntukkan untuk beras.⁸

Kondisi perberasan seperti di atas membuat pemerintah selalu dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus menekan harga beras, yang merupakan bahan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras, berapapun besarnya, akan mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Harga beras sering dijadikan parameter keberhasilan suatu pemerintahan. Sementara di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk melindungi kesejahteraan petani padi yang kebanyakan termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Pendek kata, beras memiliki peran yang amat strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik nasional.

Meski pemerintahan silih berganti, pembangunan sektor pangan dan pertanian selalu menjadi subordinasi sektor ekonomi lainnya. Keberadaannya tak lebih sebagai pengaman variabel makro, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan dagang. Adanya perbedaan masalah kepentingan

⁷ *Kompas*, 06 Januari 2006

⁸ Khudori, *Ironi Negeri Beras*, Insist Press, Yogyakarta, 2008, h. 252.

antara konsumen yang menginginkan harga rendah dan petani yang menginginkan harga tinggi atau minimal wajar dan setara dengan harga kebutuhan pokok lainnya. Untuk mengamankan variabel makro, pemerintah cenderung prokonsumen dengan kebijakan politik pangan murah. Jumlah itu, sekitar 68,55 persen yang merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.⁹

Membicarakan beras di abad ke-20, tentunya kita tidak dapat lepas dari perdagangan beras internasional, yang merupakan konsekuensi dari globalisasi. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi, telah mengurangi signifikansi sekat-sekat yang tadinya merupakan penghalang bagi interaksi antar manusia, bangsa dan Negara. Kemajuan teknologi membuat interaksi tersebut makin intensif dan frekuentif, dengan kecepatan yang meningkat drastis dan biaya yang jauh lebih ekonomis. Bangsa-bangsa di dunia semakin tergantung satu sama lain. Dunia semakin terintegrasi menjadi sebuah desa global (*global village*). Inilah pengertian sederhana globalisasi, sebuah proses integrasi kehidupan masyarakat dunia sebagai dampak dari kemajuan teknologi.¹⁰

Dipicu oleh krisis ekonomi di tahun 1997, pemerintah mengubah Bulog dari LPND menjadi PT hingga sekarang menjadi perum.¹¹ Ini berawal dari Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dalam rangka meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis

⁹ BPS, 2007.

¹⁰ Stiglitz Joseph, *Making Globalization Work*, Mizan, Bandung, 2007, hal. 16.

¹¹ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=191900> diakses pada 11 Januari, jam 09.30 BBWI.

ekonomi.¹² Tidak itu saja, utang luar negeri yang terus membengkak ke Bank Dunia dan negara atau lembaga donor lainnya memaksa Indonesia membuka pasar dan menerapkan sistem mekanisme pasar dalam kebijakan ekonomi. Indonesia tidak lagi menganut sistem ekonomi kerakyatan yang memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah krisis terjadi pada tanggal 31 Oktober 1997, dan Indonesia sepakat untuk melakukan penyesuaian (adjustment) makro ekonomi secara menyeluruh seperti yang dimandatkan IMF, Bank Dunia dan donor lainnya. Sebagai kompensasi dari paket bail-out sebesar US\$ 43 miliar, pemerintah Indonesia harus mengupayakan kembali neraca pembayaran dan mengimplementasikan reformasi atau pembaruan kebijakan kritis yang terarah pada aspek-aspek yang sangat krusial, yakni pengeluaran di sektor publik, termasuk pemotongan subsidi, privatisasi BUMN dan ekspansi partisipasi sektor swasta.¹³

Harapannya, dengan meliberalisasi sektor pangan, maka Indonesia yang notabene merupakan penghasil produk pertanian, dapat menikmati keuntungan ekonomi (meningkatnya ekspor dan menurunnya impor pangan). Sebuah studi yang dilakukan oleh IFPRI (*International Food Policy Research Institute*) di tahun 2003 menyebutkan bahwa jika liberalisasi (di sektor pertanian) dilakukan di negara-negara maju, akan terjadi peningkatan pendapatan dalam sektor pertanian dan agro-industri di Indonesia sebesar US\$ 593 atau 0,3

¹²http://ilovecassava.multiply.com/journal/item/7/Dokumen_LOI_Indonesia_IMF diakses pada 11 Januari 2009 jam 09.45 BBWI.

¹³ Khudori, op. cit., hal.190

persen dari PDB Indonesia. Liberalisasi ekonomi juga akan meningkatkan ekspor hasil pertanian sebesar US\$ 1 miliar per tahun.¹⁴

Masalahnya adalah *Letter of Intent* secara tidak langsung akan berdampak pada masalah ketahanan pangan. Melalui Persetujuan ini, pangan tidak lagi dilihat sebagai hak warga negara, namun sebagai komoditas perdagangan. Hal seperti ini justru kontradiktif dengan upaya pemenuhan hak atas pangan. Karena pangan hanya menjadi barang pasar, tetapi tidak pernah terpikirkan mengenai persoalan akses dan kepemilikan (*entitlement*).

Maka menjadi menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pengaruh ratifikasi Letter of Intent IMF terhadap ketahanan pangan Indonesia yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat atas komoditas beras. Apalagi sejak LoI IMF diberlakukan pada tahun 1998. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa Indonesia sendiri mengalami perubahan drastis, dari sebuah Negara net-exportir menjadi net-importir beras. Pada era Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1960-an hingga awal 1990-an Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengantar sektor pertanian terutama beras dari jurang kekurangan menuju swasembada. Pemenuhan kebutuhan sendiri ini berlangsung pada era 1980-an. Bahkan pada tahun 1980 hingga tahun 1985 Indonesia adalah net-eksportir beras. Namun hal ini kemudian berubah drastis.¹⁵

¹⁴ Jhamtani Hira, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005 h.113.

¹⁵ http://www.fspi.or.id/index.php?Itemid=38&id=161&option=com_content&task=view
Diakses pada 13 Desember 2008, jam 17.06 BBWI.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana pengaruh Liberalisasi pangan terhadap kebijakan pangan (beras) Indonesia, paska penandatanganan Letter of Intent IMF?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran pada dasarnya bertujuan untuk membantu menentukan arah dan tujuan penulisan serta memilih konsep yang tepat untuk membantu hipotesa. Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan **Konsep Neo-Liberalisme** dan **Konsep Penyesuaian Struktural**.

1. Neo-Liberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Konsep neoliberalisme sering dianggap sebagai perkembangan dari ide-ide liberalisme klasik.

Ada sejumlah perbedaan antara liberalisme klasik dengan liberalisme modern. Liberalisme klasik dipelopori oleh John Locke, Alexis de Tocqueville dan Adam Smith. Dalam pandangan liberalisme klasik,

Negara digambarkan sebagai ‘penjaga malam’ (night watch-man sate), yakni peran negara yang minimal, serta kebebasan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam ekonomi, baik melalui berorganisasi maupun individual. Liberalisme klasik lebih condong pada konsep pasar bebas atau laissez-faire. Sedangkan liberalisme modern menginginkan peran Negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi, yang bertugas sebagai regulator pasar, maupun penyedia barang dan jasa. Dengan kata lain, menuntut peran Negara yang lebih signifikan dalam meraih tujuan bersama, terutama ekonomi. Tokoh liberalisme modern ini antara lain , John Rawls dan John Stuart Mill. Negara kesejahteraan keynessian merupakan representasi ide-ide liberal modern, sedangkan neoliberal dianggap sebagai kebangkitan kembali liberalisme klasik. Namun demikian, keduanya memiliki persamaan yakni memiliki kepercayaan terhadap pasar.¹⁶

Reinkarnasi liberalisme ekonomi terjadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam bentuk lebih ekstrem itu berlangsung dengan mengakhiri era besar yang disebut embedded liberalism. Embedded liberalism merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga akhir dekade 1970-an. Intinya, kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang membuat relasi antara modal dan tenaga-kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasi labour pada capital. Seperti tata

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme> diakses pada tanggal 18 Mei 2009, jam 16.43 BBWI.

ekonomi seabad lalu, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja modal dari kawalan, tetapi dalam bentuk lebih ekstrem.¹⁷

Teori liberal mempunyai makna yang sangat luas, ia mencakup ekonomi, politik, filsafat atau bahkan mengenai ide-ide dalam agama. Sebagai teori politik liberalisme menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, kepemilikan pribadi (private property rights), serta hak perlindungan individu dari tindakan koersif Negara. Aliran liberalisme memandang bahwa ekonomi dan politik merupakan dua hal yang terpisah harus beroperasi menurut aturan-aturan dan logika-logikanya masing-masing.

Hal ini dikarenakan orang liberalisme menganggap ekonomi adalah hal yang determinan dalam kehidupan manusia. Ekonomi harus diraih dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan manusia. Orang liberal tidak menyukai pertimbangan politik karena dianggap tidak rasional, sehingga politik harus tunduk terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi.

Secara singkat, kita dapat memahami liberalisme sebagai:

“As a political or ideology whose also goals include most prominently the diffusion, deepening, and preservation of constitutional democracy, limited government, individual liberty, and those basic human and civil rights which are instrumental to any decent human existention” (*Sebagai sebuah program politik atau idiologi yang tujuan-tujuannya secara mencolok untuk penyebaran,*

¹⁷ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/15/opini/2290496.htm> didownload tanggal 18 Mei 2009, jam 17.00 BBWI.

*pendalaman, dan penjagaan demokrasi konstitusional, pemerintah yang terbatas, kebebasan individu dan hak-hak dasar atau asasi manusia yang merupakan penolong bagi kepantasan eksistensi manusia).*¹⁸

Neoliberalisme, pada dasarnya merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk membuat perdagangan antar-negara menjadi lebih mudah. Yakni bagaimana membebaskan pergerakan barang, jasa, sumber daya alam, tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan dalam mendapatkan sumber daya maupun tenaga kerja yang murah untuk dapat memaksimalkan keuntungan.

Dalam karakteristik general, Neoliberalisme dapat diartikan sebagai sebuah keinginan untuk mengintensifkan dan memperluas pasar, baik dalam jumlah frekuensi yang secara berulang-ulang, serta formaisasi transaksi-transaksi.¹⁹ Brad De Long, ekonom dari universitas Berkeley mendeskripsikan neoliberalisme memiliki setidaknya dua prinsip:

The first is that close economic contact between the industrial core (of the capitalist world economy) and the developing periphery is the best way to accelerate the transfer of technology which is the sine qua non for making poor economies rich (hence all barriers to International trade should be eliminate as fast as possible). The second is that governments are general lack the capacity to run large

¹⁸ Dag Elnar Thorsen & Amund Lie, "Whats Is Neoliberalism?" department of Political Science University of Oslo, <http://folk.uio.no/daget/WhatisNeo-liberalism/FINAL.pdf>.

¹⁹ Neoliberalisme: Origins, Theory, Definition, <http://web.inter.nl.net/users/paul/neoliberalism.html> diakses tanggal 19 Mei 2009, jam 17.05 BBWI.

industrial and commercial enterprise. Hence, (except for core mission of income distribution, public good infrastructure, administration of justice, and few other, governments should shrink and privatize. (*Pertama* adalah bahwa ekonomi yang tertutup berhubungan dengan pusat industri (kapitalis dunia) dengan Negara-negara berkembang atau peripheri adalah cara terbaik untuk mengakselerasikan transfer teknologi *sin qua non* untuk membuat Negara miskin menjadi kaya. (Oleh karenanya semua pembatasan internasional seharusnya di eliminasi secepat mungkin). *Kedua*, adalah secara umum, pengurangan kapasitas pemerintah untuk menjalankan industri besar dan perusahaan komersial. Oleh karenanya, dalam distribusi pendapatan, penguasaan infrastruktur public,, administrasi pengadilan, dan beberapa hal lainnya, peran pemerintah harus disusutkan dan perusahaan-perusahaan tersebut diprivatisasikan).²⁰

Indonesia menerapkan sistem mekanisme pasar dalam kebijakan ekonomi, sejak Indonesia mendapat kucuran dana dari IMF dan kemudian melakukan penyesuaian structural yang disarankan oleh IMF. Secara drastis, pemerintah mengurangi intervensi terhadap pasar. Sector-sektor penting Negara segera di privatisasi oleh pihak swasta,

²⁰ Neoliberalism, www.wikipedia.com

2. Penyesuaian Struktural

Kebijakan Penyesuaian struktural adalah kebijakan ekonomi yang harus diikuti oleh suatu negara dalam rangka memenuhi syarat peminjaman hutang dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Penyesuaian Struktural membantu mereka membayar cicilan pada utang yang lebih tua ke bank komersial, pemerintah dan Bank Dunia. Meskipun dirancang untuk masing-masing Negara, tetapi memiliki prinsip umum dan fitur yang mencakup pertumbuhan yang dipicu ekspor, privatisasi dan liberalisasi dan efisiensi pasar bebas.²¹

Penyesuaian struktural umumnya memaksa negara untuk mendevaluasi mata uang mereka terhadap dolar, mengangkat pembatasan impor dan ekspor, menyeimbangkan anggaran keuangan Negara, menghapus kontrol harga dan subsidi negara. Devaluasi membuat barang-barang lebih murah dan secara teoritis membuat impor lebih mahal. Menyeimbangkan anggaran nasional dapat dilakukan dengan menaikkan pajak, yang pasti merekomendasikan memotong pengeluaran pemerintah. Akibatnya, terjadi pemotongan anggaran dalam program-program seperti pendidikan, kesehatan dan kepedulian sosial, dan penghapusan subsidi yang dirancang untuk mengontrol harga dasar seperti makanan dan susu. Hal ini sangat merugikan masyarakat miskin, karena mereka sangat tergantung pada layanan ini dan pemotongan subsidi ini. Efek langsung dari SAP secara umum untuk kenaikan harga tiga atau empat kali, yang

²¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_adjustment

mengakibatkan meningkatnya kemiskinan sehingga sering terjadi kerusuhan.

Penyesuaian struktural yang di terapkan di Indonesia, memaksa Indonesia meliberalisasi sektor-sektor penting Negara. Kesepakatan dengan IMF menghasilkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang harus dilakukan Indonesia. Ada empat paket program yang disepakati, yaitu: (1) Penyehatan sektor keuangan; (2) Kebijakan fiskal; (3) Kebijakan moneter, termasuk kurs mata uang; dan (4) Penyesuaian Struktural.

Kebijakan penyesuaian struktural mengharuskan Indonesia untuk meliberalisasi impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan secara bebas, devaluasi, pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan barang pokok masyarakat dan menekan tuntutan kenaikan upah buruh sedangkan yang terakhir pemasukan investasi asing yang lebih lancar.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dengan menggunakan teori-teori yang relevan.
2. Untuk membuktikan hipotesa, yang dibuktikan dengan fakta dan data.

3. Disamping itu penulisan ini juga ditujukan sebagai salah satu syarat akhir untuk memenuhi dan mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Hipotesa

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, yang kemudian didukung oleh kerangka dasar pemikiran yang relevan, maka hipotesa yang dapat penulis ajukan adalah: Penerapan Letter of Intent IMF pada sektor pertanian Indonesia mengakibatkan perubahan kebijakan pangan dan ketahanan pangan Indonesia bergantung pada impor, bukan lagi pada produksi dalam negeri, dan dalam jangka panjang akan menggiring Indonesia pada jebakan pangan.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder melalui buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal, majalah-majalah, maupun surat kabar dan situs-situs yang terkait. Tidak cukup kemungkinan data juga diperoleh melalui media elektronik yang akan diusahakan kevalidannya dengan fakta-fakta yang mendukung. Kemudian data ini diolah dan dianalisa guna membahas permasalahan yang ada.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai pengaruh penerapan Letter of Intent IMF terhadap ketahanan pangan Indonesia, serta untuk mempermudah penulis melakukan penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data, dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi memfokuskan penelitian tulisan ini. Jangkauan penelitian ini dimulai dari diratifikasinya Letter of Intent IMF oleh Indonesia yaitu pada tahun 1997 hingga pelunasan hutang kepada IMF pada tahun 2006. Walaupun ada beberapa pembahasan sebelum tahun tersebut, pembahasan di tahun-tahun sebelumnya semata-mata hanya untuk menambah penjelasan saja.

I. Sistematika Penulisan

Agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan satu sama lain menuju pokok pembahasan, maka di sini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Kerangka Dasar Pemikiran
- E. Hipotesa
- F. Tujuan Penelitian
- G. Jangkauan Penelitian

H. Metode Pengumpulan Data

I. Sistematika Penulisan

BAB II IMF DI INDONESIA

A. Sejarah IMF

1. Tujuan pendirian IMF
2. Pertukaran mata uang
3. Keanggotaan dan Mekanisme pengambilan keputusan di IMF
4. Organisasi dan Personalia
5. Sumber Dana IMF
6. Jenis Fasilitas Pinjaman IMF

B. IMF dan Indonesia

1. Sejarah Hubungan Indonesia dan IMF
2. Indonesia dan IMF di Masa Krisis

C. Komitmen Indonesia dalam Letter of Intent

BAB III LIBERALISASI BERAS NASIONAL

A. Gambaran Umum

1. Peran Beras dalam Ketahanan Pangan Indonesia
2. Orde Baru dan Revolusi Hijau
3. Sejarah singkat dan Peran Bulog

B. Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia

1. Konsumsi dan Ketersediaan Pangan (*Utilization and Food Availability*)
2. Stabilitas Pangan (*Food Stability*)

**BAB IV DAMPAK LETER OF INTENT IMF TERHADAP KEBIJAKAN
PANGAN (BERAS) INDONESIA**

A. Kondisi Perberasan Nasional

1. Ketersediaan Pangan (*Food Availability*)

2. Konsumsi Pangan (*Utilization*)

B. Perubahan Institusi Bulog

C. Stabilitas Pangan (*Food Stability*)

BAB V Kesimpulan